TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

Herdy Pratama Susantyo

Dosen Prodi Hukum Fakultas Soshum Universitas Nurul Jadid Paiton

herdy@unuja.ac.id

ABSTRAK

Islam menempatkan keharmonisan dalam rumah tangga sebagai aspek fundamental, menjadikan pernikahan sebagai ikatan sakral yang bertujuan menciptakan keluarga yang sejahtera. Namun demikian, perceraian tetap menjadi realitas sosial yang sulit dihindari, meskipun dalam Islam, hal ini hanya dibolehkan sebagai opsi terakhir. Salah satu dampak terbesar dari perceraian adalah terhadap anak, yang dapat mengalami ketidakstabilan emosional, psikologis, serta kendala dalam kehidupan sosial dan akademiknya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab orang tua untuk mengurangi dampak negatif perceraian terhadap anak. Dari sudut pandang hukum, perceraian berdampak pada hak dan kewajiban orang tua, khususnya terkait hak asuh dan pemenuhan nafkah anak. Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur perlindungan anak pasca perceraian dengan berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Namun, pelaksanaan ketentuan ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidakpatuhan terhadap kewajiban nafkah dan perselisihan berkepanjangan terkait hak asuh. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif guna menganalisis efektivitas regulasi perlindungan anak pasca perceraian serta berbagai tantangan dalam implementasinya. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menjamin kesejahteraan anak setelah perceraian orang tua.

Kata kunci: Yuridis, Perlindungan, Anak, Perceraian

ABSTRACT

Islam places harmony in the household as a fundamental aspect, making marriage a sacred bond that aims to create a prosperous family. Nevertheless, divorce remains a social reality that is difficult to avoid, although in Islam, it is only allowed as a last resort. One of the biggest impacts of divorce is on children, who can experience emotional, psychological, and emotional instability in their social and academic lives. Therefore, it is the responsibility of parents to reduce the negative impact of divorce on children. From a legal point of view, divorce has an impact on the rights and obligations of parents, especially related to custody and the fulfillment of child support. In the Indonesian legal system, various regulations such as Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Child Protection Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI) have regulated the protection of children after divorce based on the principle of the best interest of the child. However, the implementation of this provision still faces a number of obstacles, such as non-compliance with maintenance obligations and prolonged disputes related to custody. This study applies normative legal methods to analyze the effectiveness of post-divorce child protection regulations and various challenges in their implementation. It is hoped that the results of this study can provide more effective policy recommendations in ensuring the welfare of children after parental divorce.

Keywords: Juridical Protection, Protection, Children, Divorce

A. Pendahuluan

Dalam tuntunan Islam secara fundamental menekankan pentingnya menciptakan dan menjaga suasana yang harmonis, tenteram, serta damai dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai suatu ikatan suci yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sejahtera dan penuh kasih sayang. Namun demikian, dalam realitas sosial, tidak semua pasangan mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga, sehingga perceraian menjadi suatu fenomena yang tak terhindarkan di tengah masyarakat. Islam memperbolehkan perceraian sebagai langkah terakhir apabila segala upaya untuk mempertahankan pernikahan tidak membuahkan hasil. Meskipun demikian, ajaran Islam tetap menganggap perceraian sebagai tindakan yang tidak disukai karena membawa konsekuensi yang luas, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai tetapi juga bagi anak-anak yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Dampak perceraian terhadap anak sering kali lebih mendalam dibandingkan dampaknya terhadap pasangan yang berpisah. Anak-anak yang mengalami perceraian orang tua cenderung kehilangan stabilitas emosional dan psikologis akibat perubahan mendadak dalam dinamika keluarga mereka.¹ Salah satu dampak utama yang dirasakan adalah hilangnya kebersamaan dan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua. Tidak jarang, anak-anak yang orang tuanya bercerai mengalami tekanan emosional, kecemasan, bahkan gangguan konsentrasi yang dapat berpengaruh pada prestasi akademik

mereka.² Selain itu, dalam jangka panjang, anak-anak tersebut berpotensi menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan stabil. Oleh karena itu, dalam proses perceraian, orang tua memiliki tanggung jawab moral dan psikologis untuk tetap menjaga komunikasi yang baik serta memberikan dukungan emosional yang memadai bagi anak guna mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul.

Dari perspektif hukum, perceraian merupakan suatu peristiwa yang membawa konsekuensi hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak, terutama terkait hak dan kewajiban setelah perceraian, termasuk hak asuh anak.³ Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian dan konsekuensinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak setelah perceraian terjadi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa meskipun terjadi perpisahan antara kedua orang tua, anak tetap memperoleh hak-haknya secara penuh, termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, dan kehidupan yang layak.⁴ Dalam ajaran Islam sendiri, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir, namun tetap diatur dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan anak.⁵

¹ Euis Sunarti, *Dampak Perceraian terhadap Anak*, Jurnal Ketahanan Keluarga Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2020

² Ahmad Fauzi, *Studi Empiris tentang Anak Korban Perceraian di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Pendidikan, Vol. 7, No. 2, 2021

³ Maria Farida, *Konsekuensi Hukum Perceraian di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keluarga, Vol. 12, No. 2, 2020.

⁴ Siti Nurhayati, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Salah satu ketentuan hukum Islam yang secara khusus mengatur hak asuh anak pasca perceraian adalah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menyatakan bahwa pengasuhan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) berada dalam tanggung jawab ibu, sedangkan anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* memiliki hak untuk memilih apakah akan diasuh oleh ayah atau ibunya. Sementara itu, kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, terlepas dari kepada siapa hak asuh diberikan. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang menitikberatkan pada kesejahteraan dan perkembangan anak pasca perceraian.

Namun, dalam implementasinya, Pasal 105 KHI menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah tidak dipatuhinya kewajiban nafkah anak oleh pihak ayah, sehingga banyak ibu yang mendapatkan hak asuh harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak tanpa dukungan finansial dari mantan suami. Selain itu, perselisihan mengenai hak asuh anak yang berkepanjangan antara kedua orang tua juga dapat memberikan dampak psikologis yang buruk bagi anak. Dalam beberapa kasus, konflik pasca perceraian ini berlanjut hingga ke ranah hukum, sehingga memperumit situasi anak yang seharusnya mendapatkan ketenangan dan kepastian dalam kehidupannya.⁶ Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah hukum yang lebih tegas guna memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi dan perceraian tidak menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan bagi mereka.

⁶ Ismail Hasani dan Lili Romli, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015.

Dengan demikian, diperlukan suatu kajian yuridis yang mendalam dan menyeluruh guna menilai sejauh mana efektivitas regulasi yang telah ditetapkan dalam melindungi anak pasca perceraian. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi hukum serta merumuskan solusi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak yang terdampak oleh perceraian orang tua mereka.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan anak pasca perceraian dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan pendekatan empiris guna memahami implementasi aturan tersebut dalam praktik.

C. Pembahasan

1. ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak pasca perceraian dalam sistem hukum Indonesia

Di Indonesia, perlindungan anak setelah perceraian diatur dalam berbagai regulasi yang menegaskan hak-hak anak serta tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan mereka meskipun telah bercerai. Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menjamin kesejahteraan, perlindungan, serta perkembangan anak tetap terpenuhi, meskipun terjadi perubahan dalam struktur keluarga akibat perceraian. Berikut ini adalah beberapa ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak pasca perceraian dalam sistem hukum Indonesia.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan perkawinan, termasuk ketentuan mengenai perceraian serta perlindungan hak-hak anak pasca perceraian. Beberapa ketentuan yang mengatur perlindungan anak dalam undang-undang ini, antara lain:

Pasal 41 menetapkan bahwa perceraian memiliki konsekuensi hukum terhadap tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka, yaitu:

- a) Kedua orang tua, baik ibu maupun ayah, tetap memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka.
- b) Ayah bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali dalam keadaan tidak mampu, maka ibu dapat turut menanggungnya.
- c) Pengadilan berwenang mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup kepada mantan istri dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri.

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian, prinsip **kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)** harus selalu diutamakan. Selain itu, beban tanggung jawab finansial untuk kebutuhan anak tetap menjadi kewajiban utama ayah sebagai kepala keluarga, kecuali ada alasan yang sah yang mengharuskan ibu ikut menanggungnya.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak (Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak anak, termasuk dalam situasi perceraian orang tua. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak tetap mendapatkan perlindungan, pengasuhan, serta pemenuhan hak-haknya meskipun orang tuanya telah bercerai. Beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan perlindungan anak pasca perceraian, antara lain:

Pasal 3 menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 14 menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut merupakan langkah terbaik demi kepentingan anak.

Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak, dengan tetap memperhatikan perkembangan, kemampuan, bakat, dan minat anak.

Pasal 45A ayat (2) menegaskan bahwa dalam kasus perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Undang-Undang ini memperjelas bahwa meskipun perceraian terjadi, tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hilang. Keduanya tetap berkewajiban dalam aspek pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak guna menjamin kesejahteraan serta masa depan anak.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105

Bagi umat Islam di Indonesia, **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara perceraian, termasuk pengaturan hak asuh anak pasca perceraian. Pasal 105 KHI menetapkan ketentuan sebagai berikut:

Hak asuh anak yang belum mumayyiz (di bawah usia 12 tahun) berada di tangan ibu.

Hak asuh anak yang telah mumayyiz diberikan kepada anak untuk memilih apakah ingin diasuh oleh ayah atau ibu.

Tanggung jawab nafkah tetap menjadi kewajiban ayah, terlepas dari siapa yang memperoleh hak asuh.

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang masih kecil mendapatkan pengasuhan terbaik dari ibu sebagai sosok yang lebih dekat secara emosional, sementara anak yang telah mencapai usia cukup untuk menentukan pilihannya tetap diberikan hak untuk memilih dengan mempertimbangkan kepentingan terbaiknya.

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, termasuk dalam kasus perceraian dan hak asuh anak. Peraturan ini menekankan bahwa:

Hakim wajib mempertimbangkan aspek psikologis anak dalam putusan hak asuh agar keputusan yang diambil tidak berdampak negatif terhadap perkembangan emosional anak.

Hakim harus memastikan bahwa putusan terkait hak asuh dan nafkah anak tidak merugikan ibu atau anak, sehingga mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Hakim perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi mantan istri yang memperoleh hak asuh, guna memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian.

PERMA ini menegaskan pentingnya **perspektif gender dan perlindungan anak** dalam setiap putusan pengadilan terkait perceraian, sehingga keadilan dapat terwujud bagi perempuan dan anak yang terdampak.

5. Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi

Dalam praktik peradilan, berbagai putusan pengadilan telah memperkuat prinsip **perlindungan anak pasca perceraian**. Beberapa yurisprudensi menunjukkan bahwa:

Hakim dapat memberikan hak asuh kepada ibu, meskipun anak

telah berusia lebih dari 12 tahun, jika terdapat alasan kuat bahwa ibu lebih mampu menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.

Jika ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah, ibu atau wali anak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memastikan ayah tetap menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum.

Putusan-putusan ini mencerminkan bahwa dalam setiap perkara hak asuh dan nafkah anak, **kepentingan terbaik anak (best interest of the child)** tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan hukum.

2. Mengkaji Implementasi Hak Asuh dan Pemenuhan Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian

Pelaksanaan hak asuh serta pemenuhan nafkah anak dalam kasus perceraian merupakan elemen krusial dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Perceraian tidak hanya memengaruhi pasangan yang berpisah, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum bagi anak-anak mereka, khususnya dalam hal pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan finansial. Studi mengenai implementasi ketentuan ini mencakup berbagai aspek, seperti regulasi perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta berbagai tantangan yang muncul dalam penerapannya.

1. Implementasi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

a. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Hak asuh anak setelah perceraian diatur dalam beberapa regulasi, antara lain:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 41), yang menegaskan bahwa hak asuh anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak meskipun orang tua mereka bercerai.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105, yang menyatakan bahwa hak asuh anak di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu, sementara anak yang sudah mumayyiz (di atas 12 tahun) dapat memilih tinggal dengan ayah atau ibunya.

b. Proses Penentuan Hak Asuh di Pengadilan

Dalam sistem peradilan Indonesia, hak asuh anak pasca perceraian diputuskan oleh pengadilan berdasarkan berbagai pertimbangan, seperti:

Kesejahteraan dan perkembangan psikologis anak.

Kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, baik secara emosional maupun finansial.

Kedekatan emosional anak dengan masing-masing orang tua sebelum perceraian terjadi.

Hakim juga dapat mempertimbangkan bukti-bukti pendukung seperti rekam jejak pengasuhan dan kondisi psikososial orang tua sebelum membuat keputusan.

c. Tantangan dalam Implementasi Hak Asuh

Meskipun aturan hukum telah mengatur hak asuh secara jelas, dalam praktiknya terdapat beberapa tantangan, antara lain:

Sengketa hak asuh yang berlarut-larut akibat konflik antara mantan suami dan istri.

Kurangnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, seperti kasus di mana ayah atau ibu tetap membawa anak tanpa izin dari pihak yang mendapatkan hak asuh.

Dampak psikologis pada anak, terutama jika terjadi konflik berkepanjangan antara kedua orang tua. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penguatan mekanisme mediasi dan konseling keluarga untuk mengurangi dampak negatif pada anak.

2. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

a. Ketentuan Hukum Mengenai Nafkah Anak

Pemenuhan nafkah anak setelah perceraian diatur dalam beberapa peraturan hukum, antara lain:

Pasal 41 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa ayah bertanggung jawab atas pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali jika tidak mampu, maka ibu dapat ikut menanggungnya.

Pasal 45 UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa orang tua tetap memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anak, termasuk setelah perceraian.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya meskipun hak asuh dipegang oleh ibu.

b. Tantangan dalam Implementasi Nafkah Anak

Dalam praktiknya, banyak kasus di mana ayah yang seharusnya bertanggung jawab atas nafkah anak justru menghindari kewajiban tersebut. Beberapa tantangan yang sering terjadi meliputi:

Kurangnya penegakan hukum terhadap orang tua yang tidak membayar nafkah anak.

Ketidakmampuan ekonomi mantan suami, yang membuatnya tidak dapat memenuhi kebutuhan anak.

Tidak adanya mekanisme pemantauan yang efektif, sehingga banyak ibu yang harus menanggung beban finansial anak seorang diri.

c. Solusi dan Upaya Peningkatan Kepatuhan terhadap Nafkah Anak

Untuk memastikan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi:

Meningkatkan penegakan hukum, misalnya dengan menerapkan sanksi bagi ayah yang tidak membayar nafkah anak sesuai putusan pengadilan.

Mengembangkan sistem pemotongan gaji otomatis, sehingga pembayaran nafkah anak dapat langsung dipotong dari penghasilan orang tua yang bertanggung jawab.

Memperkuat peran lembaga sosial, seperti Dinas Perlindungan

Anak, untuk membantu ibu dalam menagih nafkah anak dari mantan suaminya.

3. Kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum bagi Anak Pasca Perceraian dan Solusinya

Perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian menjadi aspek krusial dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi telah menetapkan hak-hak anak serta kewajiban orang tua, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Artikel ini membahas kendala dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak pasca perceraian serta menawarkan alternatif solusi untuk mengatasinya.

a. Rendahnya Kepatuhan terhadap Putusan Hak Asuh dan Nafkah Anak

Banyak kasus menunjukkan bahwa pihak yang berkewajiban memberikan nafkah anak, khususnya ayah, sering kali tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah ada putusan pengadilan. Selain itu, hak asuh anak yang telah ditetapkan sering kali tidak dihormati oleh mantan pasangan, misalnya dengan tindakan pengambilan anak secara sepihak tanpa persetujuan hukum.

b. Keterbatasan dalam Penegakan Hukum

Kurangnya mekanisme yang efektif untuk menindak orang tua yang lalai dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian menjadi kendala utama dalam implementasi hukum. Selain itu, koordinasi yang lemah antara pengadilan, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak turut menghambat upaya penegakan

kepatuhan terhadap putusan hukum terkait hak asuh dan nafkah anak.

c. Faktor Ekonomi dan Kesulitan Finansial

Banyak ayah menggunakan alasan ketidakmampuan finansial untuk menghindari tanggung jawab dalam memberikan nafkah anak. Di sisi lain, ibu yang memperoleh hak asuh kerap harus menanggung sendiri biaya hidup anak akibat tidak adanya sistem pemantauan yang ketat terhadap pembayaran nafkah.

d. Dampak Psikologis dan Sosial terhadap Anak

Anak yang terjebak dalam konflik berkepanjangan antara orang tua sering mengalami tekanan psikologis yang berdampak pada perkembangan emosional dan sosial mereka. Kurangnya pendampingan psikologis yang memadai pasca perceraian semakin meningkatkan risiko gangguan mental dan emosional bagi anak.

4. Strategi Mengatasi Kendala dalam Perlindungan Hukum bagi Anak Pasca Perceraian

Untuk memastikan anak tetap memperoleh hak-haknya meskipun orang tua telah bercerai, diperlukan berbagai langkah strategis, di antaranya:

a. Penguatan Penegakan Hukum

Menerapkan sanksi tegas bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak, seperti pembekuan rekening atau pemotongan gaji secara otomatis sesuai dengan putusan pengadilan.

Memperkuat peran aparat penegak hukum dalam memastikan kepatuhan

terhadap putusan hak asuh, termasuk mencegah pengambilan anak secara sepihak oleh pihak yang tidak memiliki hak asuh yang sah.

b. Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Anak

Mengoptimalkan fungsi lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengawasi serta menangani kasus-kasus hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian.

Menyediakan layanan bantuan hukum serta pendampingan psikologis bagi ibu dan anak yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan hak-haknya.

c. Reformasi Sistem Pemenuhan Nafkah Anak

Mengembangkan sistem pemotongan gaji otomatis atau skema dana jaminan nafkah anak bagi orang tua yang lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya.

Memberikan bantuan sosial atau subsidi bagi ibu tunggal yang mengalami kesulitan ekonomi akibat tidak menerima nafkah dari mantan suaminya.

d. Pendampingan Psikologis dan Edukasi bagi Anak dan Orang Tua

Menyediakan program konseling untuk membantu anak-anak beradaptasi dengan perubahan dalam struktur keluarga akibat perceraian.

Menedukasi orang tua mengenai pentingnya memenuhi hak-hak anak pasca perceraian agar mereka tidak terjebak dalam konflik pribadi yang berkepanjangan.

D. Kesimpulan

Perlindungan anak pasca perceraian merupakan elemen krusial dalam sistem hukum Indonesia dan diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017.

1. Dalam menentukan hak asuh dan pemenuhan nafkah anak, prinsip utama yang diterapkan adalah kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan hukum.
2. Hak asuh umumnya diberikan kepada ibu bagi anak yang belum mencapai usia mumayyiz (di bawah 12 tahun), sedangkan anak yang lebih besar memiliki kebebasan untuk memilih dengan siapa mereka ingin tinggal.
3. Tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah kepada anak tetap berada pada ayah. Namun, apabila ayah tidak mampu secara finansial, ibu dapat berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan anak.
4. Pengadilan dan yurisprudensi memiliki peran penting dalam menjamin penerapan hukum yang adil serta menyesuaikannya dengan kondisi sosial di masyarakat.
5. Walaupun peraturan telah mengatur hak-hak anak secara jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, lemahnya penegakan

hukum, serta hambatan ekonomi yang menyulitkan pemenuhan nafkah anak.

E. Saran

1. Penguatan Penegakan Hukum

Memberlakukan sanksi yang lebih tegas bagi orang tua yang lalai dalam memenuhi kewajiban nafkah anak, seperti pemblokiran rekening atau pemotongan gaji secara otomatis.

Memperkuat koordinasi antara pengadilan, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan pelaksanaan putusan terkait hak asuh dan nafkah anak berjalan efektif.

2. Optimalisasi Peran Lembaga Perlindungan Anak

Memperkuat peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam mengawasi serta memberikan pendampingan hukum bagi anak-anak yang terdampak perceraian.

Menyediakan layanan bantuan hukum dan dukungan psikologis bagi ibu dan anak yang mengalami kesulitan dalam implementasi hak asuh dan pemenuhan nafkah.

3. Reformasi Sistem Pemenuhan Nafkah Anak

Membangun mekanisme dana jaminan nafkah anak agar kebutuhan finansial anak tetap terpenuhi meskipun ayah tidak menjalankan kewajibannya.

Menyediakan bantuan sosial bagi ibu tunggal yang mengalami kesulitan ekonomi akibat tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami.

4. Pendampingan Psikologis dan Edukasi bagi Orang Tua dan Anak

Mengembangkan program konseling keluarga untuk membantu anak mengatasi dampak psikologis akibat perceraian.

Meningkatkan edukasi hukum bagi orang tua agar mereka memahami pentingnya memenuhi hak-hak anak setelah perceraian serta konsekuensi hukum bagi yang mengabaikannya.

Dengan penerapan kebijakan yang lebih ketat dan sistematis, diharapkan perlindungan anak pasca perceraian dapat diwujudkan secara optimal, sehingga kesejahteraan serta masa depan anak tetap terjamin.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Ismail Hasani dan Lili Romli, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015.

Subekti, R. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2020.

Euis Sunarti, *Dampak Perceraian terhadap Anak*, Jurnal Ketahanan Keluarga Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2020

Ahmad Fauzi, *Studi Empiris tentang Anak Korban Perceraian di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Pendidikan, Vol. 7, No. 2, 2021

Maria Farida, *Konsekuensi Hukum Perceraian di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keluarga, Vol. 12, No. 2, 2020.

Siti Nurhayati, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.

Jurnal Hukum dan Peradilan, berbagai edisi yang membahas tentang hak asuh dan perlindungan anak dalam hukum Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 tentang hak asuh anak pasca perceraian.

Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi

Berbagai putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama yang menjadi yurisprudensi dalam perkara hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian.